



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia telah mengenal sistem barter sejak sebelum Masehi, sejak itu pula manusia telah menerapkan suatu bidang yang sekarang disebut ekonomi. Ekonomi menciptakan kehidupan yang dinamis dan lebih makmur bagi manusia pada umumnya, sehingga pertumbuhan perekonomian turut menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Di zaman modern ini, salah satu penyebab utama pertumbuhan perekonomian adalah kegiatan investasi.

Selain alih teknologi, pendapatan devisa, serta pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah terpencil, manfaat nyata kegiatan investasi bagi suatu negara adalah penciptaan lapangan kerja. Berikut ini adalah Tabel 1.1 yang menunjukkan realisasi kegiatan investasi dan kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia selama 6 tahun terakhir menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM):

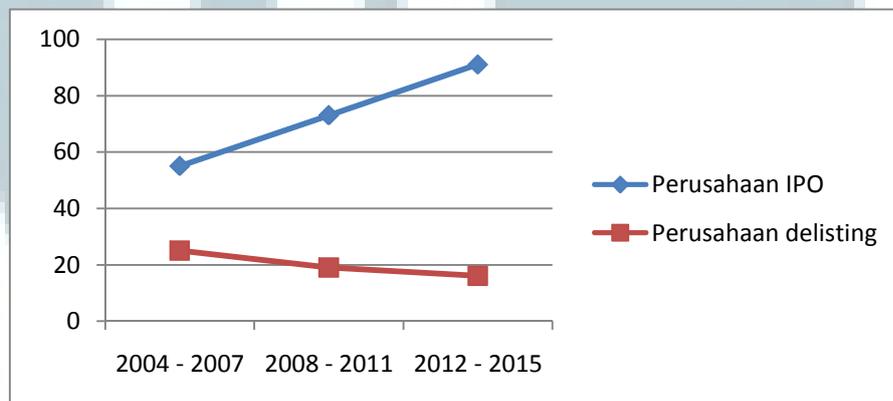
Tabel 1.1
Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja 2010–2015

| Tahun | Realisasi Investasi | Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja |
|--------------|----------------------------|--|
| 2010 | Rp 208,5 triliun | 1.045.354 tenaga kerja |
| 2011 | Rp 251,3 triliun | 1.159.905 tenaga kerja |
| 2012 | Rp 313,2 triliun | 1.289.506 tenaga kerja |
| 2013 | Rp 398,6 triliun | 1.829.950 tenaga kerja |
| 2014 | Rp 463,1 triliun | 1.430.846 tenaga kerja |
| 2015 | Rp 545,4 triliun | 1.435.711 tenaga kerja |
| Jumlah | Rp 2.180,1 triliun | 8.191.272 tenaga kerja |

Sumber: BKPM, 2016

Pertumbuhan kegiatan investasi di Indonesia salah satunya diindikasikan dengan peningkatan jumlah perusahaan *private* maupun *public*. Peningkatan jumlah perusahaan *public* sendiri dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang melakukan *initial public offering (IPO)* di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terus bertambah. Semakin baik lagi, karena perusahaan yang *delisting* justru cenderung menurun dari waktu ke waktu sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Perusahaan IPO dan Delisting di BEI



Sumber: diolah dari BEI, 2016

Gambar 1.1 menggambarkan bahwa pada periode 2004–2007 terdapat 55 perusahaan yang melakukan *IPO*, sementara periode 2008–2011 ada 73 perusahaan, kemudian periode 2012–2015 ada 91 perusahaan *IPO*. Di sisi lain pada periode 2004–2007 terdapat 25 perusahaan yang *delisting*, lalu pada 2008–2011 ada 19 perusahaan, dan pada periode 2012–2015 ada 16 perusahaan yang *delisting*. Sehingga pada 31 Desember 2015 tercatat ada sebanyak 525 perusahaan tercatat di BEI (BEI, 2016).

Sementara itu persentase pertumbuhan perusahaan *IPO* di hampir semua industri juga mengalami pertumbuhan yang baik setiap periodenya. Contohnya

pada industri jasa, persentase pertumbuhan jumlah perusahaan jasa (*IPO* di BEI) pada periode 2011–2015 sebesar 34,782%, lebih besar 10% dibandingkan persentase pertumbuhan jumlah perusahaan jasa (*IPO* di BEI) pada periode sebelumnya (2005–2009) yaitu sebesar 24,782% (diolah dari BEI, 2016).

Dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan *IPO* serta persentase peningkatan perusahaan *IPO* yang justru disertai penurunan angka *delisting*, tentunya semakin banyak perusahaan yang membutuhkan suntikan dana. Hal ini membuat semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan-perusahaan di BEI untuk memperebutkan investor. Akibatnya, persaingan untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan laba bersih, meningkatkan *rating* saham, meningkatkan *return*, dan persaingan lainnya pun terjadi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik agar lebih menarik investor. Investor akan menilai kinerja perusahaan yang terdokumentasikan melalui laporan keuangannya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada PSAK, disebutkan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Sementara tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2014).

Menyadari pentingnya kandungan informasi pada laporan keuangan untuk mendapatkan investor yang menyokong eksistensi perusahaan, memotivasi manajemen untuk meningkatkan dan menjaga tingkat laba yang dilaporkan sehingga dapat meningkatkan dan menjaga tingkat penerimaan dana investasi. Bagi manajemen, kinerja yang baik dan stabil juga akan menjadi dasar pemberian bonus, kenaikan gaji, maupun pemberian insentif lainnya (Martani, dkk, 2012). Meski begitu, terkadang manajemen gagal dalam mencapai target kinerjanya sehingga informasi yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan kurang memuaskan. Laporan keuangan ini akan menurunkan minat investor potensial, bahkan dapat membuat investor lama menarik investasinya, membuat *rating* kredit menurun, kepercayaan *supplier* menurun, bahkan kepercayaan konsumen hilang, yang pada akhirnya dapat membuat perusahaan tersendat kegiatan operasionalnya dan jika terjadi secara terus-menerus bisa menyebabkan perusahaan bangkrut. Sementara bagi manajemen, laporan keuangan yang kurang memuaskan dapat berdampak pada pengurangan insentif, penghentian insentif, rotasi jabatan, bahkan pemecatan.

Untuk menghindari risiko-risiko yang dapat muncul akibat laporan keuangan yang berkinerja buruk, manajemen terkadang rela melakukan manipulasi agar informasi dalam laporan keuangan terlihat baik, sehingga tetap menarik bagi investor. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Gurun, dkk (2016) bahwa kepercayaan mendasari hampir semua transaksi keuangan dan kepercayaan memiliki efek yang besar dan persisten terhadap *investor behavior*. Dengan demikian, kegiatan investasi sebenarnya termasuk sangat sensitif dan

rentan terhadap isu kecurangan pelaporan keuangan atau *fraudulent financial reporting (FFR)*.

Komisi Treadway (1987) dalam Hasnan *et al.* (2013) mendefinisikan *FFR* sebagai tindakan penyimpangan secara sengaja terhadap arsip perusahaan seperti kesalahan penerapan prinsip akuntansi, yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Oleh karenanya, laporan keuangan yang manipulatif akan menyebabkan kerugian bagi para penggunanya, diantaranya bagi investor (karena tingkat *return* faktual yang diperoleh tidak sesuai dengan yang dicerminkan laporan keuangannya), pemerintah (karena berpotensi mengurangi pendapatan negara melalui pajak pendapatan usaha), kreditur (karena kredit yang diberikan bisa jadi berpotensi macet), *supplier* (kemungkinan piutang menjadi *bad debt expense* lebih tinggi), bahkan pihak manajemen perusahaan itu sendiri (karena laporan keuangan sebagai sumber informasi dalam membuat kebijakan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya). Selain itu, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2014) menyatakan setiap tahunnya rata-rata perusahaan kehilangan setidaknya 5% *annual revenue* mereka karena *fraud*. Kerugian-kerugian tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus *FFR* yang pernah terjadi di dunia yang jelas merugikan banyak pihak, contohnya pada kasus skema ponzi Bernard Madoff.

Bernard L. Madoff Investment Securities LLC adalah sebuah perusahaan investasi yang didirikan tahun 1960 di Amerika Serikat oleh Bernard Madoff, seorang mantan *chairman* NASDAQ. Perusahaan ini sejak 1991 telah melakukan praktek kecurangan keuangan yang berupa skema ponzi dengan kemasan investasi

berbunga tinggi. Salah satu kunci keberhasilan Madoff dalam menipu investor yakni melalui laporan keuangan manipulatif yang disusun oleh Daniel Bonventre, selain itu ia juga menipu pemerintah dengan membuat laporan pajak manipulatif yang disusun oleh Paul Konigsberg. Selanjutnya laporan keuangan tersebut tanpa melalui prosedur audit yang layak langsung mendapatkan tandatangan David Friebling, *partner* utama dari Kantor Akuntan Publik Friebling & Horowitz. Pada tahun 2008 kasus ponzi ini akhirnya berhasil terbongkar (<http://fbi.gov/>, 2014).

Total estimasi kerugian yang ditimbulkan dari skema ponzi Madoff adalah sebesar USD 64,8 miliar yang berasal dari sedikitnya 13.500 korban yang terdiri dari bank, lembaga donasi, lembaga sosial, uang pensiunan, dan lainnya. Di samping kerugian material, banyak investor Madoff yang juga mengalami kerugian psikologis seperti depresi dan gangguan jiwa, terdapat juga 2 kasus bunuh diri yang dilakukan oleh William Foxton dan Rene-Thierry Magon de la Villehucet. Selain investor, anak sulung Madoff, yaitu Mark dan anak sulung Friebling, Jeremy juga bunuh diri akibat depresi. Atas kerugian ini Madoff dijatuhi hukuman penjara 150 tahun dan restitusi sebesar USD 170 miliar. Sementara itu Bonventre dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, Konigsberg terancam hukuman penjara 30 tahun dengan denda sebesar USD 4,4 juta, dan Friebling selain dicabut sertifikasi akuntan publiknya, ia juga dijatuhi hukuman tahanan rumah 1 tahun dan ancaman denda hingga USD 130 juta. Disamping itu masih banyak lagi komplotan Madoff yang saat ini sudah dijatuhi hukuman maupun masih dalam tahap persidangan, diantaranya Peter Madoff, Norman F. Levy, dan Fred Wilpon (<http://nytimes.com/>, 2015).

Di Indonesia sendiri sering terjadi kasus-kasus *FFR*, salah satunya kasus Bakrie Group tahun 2010. Pada laporan keuangan konsolidasian Bakrie Group kuartal 1 2010 yang termasuk laporan keuangan entitas anaknya, terdapat saldo deposito berjangka di Bank Capital sebesar Rp 9,055 triliun. Sementara itu, laporan keuangan Bank Capital pada periode yang sama menunjukkan jumlah investasi Bakrie Group dalam bentuk deposito tercatat hanya senilai Rp 2,171 triliun, artinya terdapat selisih Rp 6,884 triliun (<http://republika.co.id/>, 2010).

Penyidikan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK atau yang sekarang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan Bakrie Group sebagai pihak yang bersalah. Akibat kasus tersebut, empat emiten anak Bakrie Group yaitu, PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Benakat Petroleum Energy Tbk masing-masing dikenakan denda Rp 500 juta oleh BEI (<http://bisniskeuangan.kompas.com/>, 2010). Keempat emiten tersebut juga dikenakan sanksi berupa denda sebesar total Rp 1 miliar dari OJK (OJK, 2016). Sementara itu, meskipun Bank Capital dinyatakan tidak bersalah namun terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah nasabah baru terkait isu *trust* sebagai dampak kasus Bakrie Group (<http://detik.com/>, 2010). Sebelumnya, Bakrie Group juga sudah pernah dinyatakan bersalah dalam beberapa kasus penggelapan pajak yang merugikan negara hingga triliunan Rupiah, kasus gagal bayar Bakrie Life, serta kasus gadai saham PT Bakrie & Brothers. Selain kasus Bakrie Group, berikut ini adalah Tabel 1.2 yang memperlihatkan 4 contoh kasus *FFR* yang terjadi di Indonesia selama tahun 2015:

Tabel 1.2
Contoh Kasus *FFR* 2015

| Nama Perusahaan | Bentuk Kecurangan | Sanksi dari OJK |
|------------------------------|--|------------------------|
| PT Capitalinc Investment Tbk | Pelanggaran terhadap <i>disclosure</i> setelah periode pelaporan | Rp 50.000.000,- |
| PT Gading Development Tbk | Pelanggaran pengakuan akun persediaan-tanah | Rp 25.000.000,- |
| PT Inovisi Infracom Tbk | Pelanggaran pengungkapan pihak berelasi | Rp 100.000.000,- |
| PT Roda Vivatex Tbk | Pelanggaran pengungkapan modal saham | Rp 150.000.000,- |

Sumber: OJK, 2016

Banyaknya *FFR* yang terjadi pastinya dilandasi oleh suatu faktor. Faktor-faktor utama penyebab *FFR* menurut *fraud triangle* oleh Cressey (1953) dalam Diany (2014) adalah tekanan yaitu dorongan internal maupun eksternal yang memicu bahkan memaksa seseorang melakukan *fraud*, peluang yaitu kesempatan yang timbul atas pengawasan yang lemah ataupun kekuasaan yang besar, dan yang terakhir rasionalisasi yaitu pembenaran atas penyimpangan yang akan dilakukan. Ketiganya memiliki proksi-proksi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta menemukan bukti empiris mengenai pengaruhnya terhadap *FFR* itu sendiri. Beberapa proksi tersebut misalnya *return on assets (ROA)* dan *total asset turnover (TAT)* untuk tekanan, *independent commissioner ratio (IND)* untuk peluang, *change in public accountant (CPA)* dan *change in total accrual ratio (TAC)* untuk rasionalisasi.

ROA dan *TAT* adalah ukuran kinerja operasi yang digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien aset telah digunakan untuk menghasilkan laba bersih (pada *ROA*) maupun penjualan (pada *TAT*) (Skousen *et al*, 2009 dalam Rachmawati, 2014). Persons (1995) dalam Ansar (2012) menyatakan bahwa

perusahaan dengan tingkat *profit* yang rendah cenderung memberi tekanan bagi manajemen dalam pengungkapan lebih saji *revenues* atau kurang saji *expenses*. Bagi pihak perusahaan langkah ini merupakan upaya untuk menghindari risiko kehilangan eksistensi dan *market share* yang ditimbulkan oleh penarikan dana oleh investor dan kehilangan dana potensial dari calon investor.

Sementara itu menurut Summers dan Sweeney (1998) dalam Sihombing (2014) manajemen memiliki keinginan individu untuk mendapatkan bonus atau kenaikan gaji serta menghindari pemecatan maupun sanksi yang akan diberikan apabila kinerja perusahaan dinilai tidak *profitable*. Sehingga, *ROA* yang rendah cenderung mengarahkan terjadinya *FFR* di perusahaan (Daljono, 2013), sama seperti *TAT* yang berpengaruh terhadap *FFR* (Diany, 2014). Namun penelitian Rachmawati (2014) membuktikan sebaliknya bahwa *ROA* tidak memiliki pengaruh terhadap *FFR* begitu juga dengan Nugraha (2015) yang membuktikan bahwa *TAT* tidak berpengaruh terhadap *FFR*.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (OJK, 2014). Umumnya seorang komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, direktur, manajemen ataupun pihak internal lainnya akan melakukan pengawasan dengan lebih independen, sehingga mereka dipercaya untuk memainkan peranan penting khususnya memonitor manajemen tingkat atas (Gunarsih dan Hartadi, 2002 dalam Nugraha, 2014). Dengan adanya dewan komisaris independen, diharapkan pengawasan perusahaan semakin efektif dan praktik kecurangan dapat diminimalkan.

Sebaliknya, semakin sedikit komisaris independen dapat menunjukkan kurangnya pengawasan sehingga cenderung menyebabkan kecurangan terjadi. Pernyataan Standar Audit No.70 menunjukkan sebagian *FFR* timbul dari dominasi manajemen oleh individu atau kelompok kecil, tanpa adanya pengendalian yang mengompensasi kondisi tersebut, seperti pengawasan oleh dewan komisaris atau komite audit (IAPI, 2013). Hasil penelitian Adiningtyas (2015) membuktikan bahwa *FFR* lebih mungkin terjadi pada perusahaan yang memiliki lebih sedikit komisaris independen. Akan tetapi, teori ini tidak didukung oleh penelitian Daljono (2013) yang tidak menemukan pengaruh komisaris independen terhadap *FFR*.

Menurut Agoes (2012), audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen (auditor) terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen, beserta catatan, dan bukti-bukti pendukungnya untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor adalah pihak yang bertugas untuk menemukan ketidakwajaran atau bahkan *FFR*. Akan tetapi, auditor umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan kompetensi spesifik untuk benar-benar mendapatkan gambaran yang menyeluruh atas *client* untuk bisa menentukan *tolerable misstatement* dan metode *sampling* yang tepat, pos-pos yang mungkin rentan terhadap *FFR*, maupun tipe-tipe *fraud* yang mungkin terjadi pada *client*. Meski demikian, auditor tidak selalu mempunyai waktu yang cukup untuk memperoleh gambaran komprehensif atas *client*. Sehingga pada periode awal audit terhadap suatu *client*, terkadang auditor

belum berhasil menemukan ketidakwajaran yang ada pada laporan keuangan *client*. Tidak ditemukannya ketidakwajaran pun seolah menjadi pembenaran bagi pihak perusahaan atas ketidakwajaran yang terjadi, sekaligus menjadi titik yang memunculkan niat untuk melakukan *FFR*. Jadi, semakin sering pergantian auditor dilakukan dalam suatu perusahaan, semakin besar pula kemungkinan rasionalisasi dapat menimbulkan *FFR* (Sorenson *et al.*, 1983 dalam Rachmawati, 2014). Rachmawati (2014) dalam penelitiannya juga telah berhasil membuktikan pengaruh dari seringnya pergantian auditor terhadap *FFR*, meskipun begitu penelitian Fimanaya (2014) tidak berhasil membuktikan hal yang sama.

Dalam mengklasifikasikan akun-akun akrual memang terdapat *guidelines* dari PSAK, namun karena setiap bisnis bisa jadi memiliki *nature of accounts* yang berbeda sehingga butuh *treatment* yang berbeda, menyebabkan masih terdapatnya *grey area* yang perlu ditetapkan dengan *professional judgment*. Akibatnya, akun-akun akrual sarat dengan penilaian-penilaian subjektif perusahaan. Penilaian dan pengambilan keputusan yang subjektif tersebut menjadi rasionalisasi dari nilai akrual dimana perusahaan dapat mengklasifikasikan berbagai akun ke dalam maupun keluar dari kelompok akrual berdasarkan penilaiannya sendiri (Skousen *et al.*, 2009 dalam Sihombing, 2014). Umumnya perusahaan menginginkan akrual yang tinggi atas piutang untuk meningkatkan profitabilitas. Di sisi lain akrual yang rendah atas piutang yang belum tertagih, depresiasi, dan beban yang belum dibayarkan agar terlihat *collectible*, *solvable*, dan *liquidable* dalam rangka memperoleh kredit, *supply*, maupun dana investor. Jadi untuk menghindari nilai akrual yang terlalu tinggi maupun rendah, manajemen pun cenderung melakukan

FFR. Menurut Skousen (2009) dalam Sihombing (2014), proksi *TAC* dapat digunakan untuk menggambarkan rasionalisasi terkait dengan penggunaan prinsip akrual oleh manajemen. Berdasarkan penelitian Sihombing (2014), *TAC* berpengaruh signifikan terhadap *FFR*, namun begitu Ardiyani (2015) tidak menemukan pengaruh tersebut pada penelitiannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab *FFR* menggunakan analisis *fraud triangle*. Dimana pada penelitian ini faktor tekanan terdiri dari 2 variabel independen yaitu *financial pressure* yang diproksikan dengan masing-masing *ROA* dan *TAT*, sementara faktor peluang terdiri dari 1 variabel independen yaitu *ineffective monitoring* dengan proksi *IND*, kemudian faktor rasionalisasi terdiri dari 2 variabel independen yaitu *auditor switch* dengan proksi *CPA* serta variabel *justification* dengan proksi *TAC*. Terdapat juga 1 variabel dependen yaitu *FFR* dengan proksi *database* sanksi OJK (untuk tahun 2011–2015) untuk menentukan perusahaan *FFR*, lalu kriteria *sampling* Beasley (1996) dalam Karissa (2012) untuk menentukan sampel perusahaan non-*FFR* sebagai sampel pembanding. Dengan demikian penulis menyatakan untuk menyusun skripsi yang berjudul, **”Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Perspektif *Fraud Triangle* Terhadap *Fraudulent Financial Reporting* (Pada Perusahaan Non-Keluangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011–2015)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rachmawati pada tahun 2014. Namun begitu, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Rachmawati, adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Periode observasi penelitian ini adalah 2011–2015, sedangkan Rachmawati melakukan penelitiannya untuk periode 2008–2012.
2. Penelitian ini tidak menggunakan variabel kepemilikan asing, *leverage*, dan transaksi pihak istimewa oleh Rachmawati (2014) karena tidak berpengaruh signifikan terhadap *FFR*. Kemudian variabel multijabatan dewan direksi pada Rachmawati juga tidak dipakai karena kurangnya literatur pendukung dan keterbatasan sumber data. Penelitian ini menambahkan variabel *financial target* dengan proksi *TAT* oleh Diany (2014) dan *justification* dengan proksi *TAC* oleh Ardiyani (2014).

1.2 Batasan Masalah

Agar dapat menghasilkan penelitian yang spesifik dan tidak melebar luas, peneliti perlu untuk memberikan suatu batasan bagi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Adapun batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2011–2015.
2. Variabel independen dari penelitian ini adalah *financial pressure* yang diproksikan oleh *ROA*, *financial pressure* yang diproksikan oleh *TAT*, *ineffective monitoring* yang diproksikan oleh *IND*, *auditor switch* yang diproksikan oleh *CPA*, dan *justification* yang diproksikan oleh *TAC*. Sementara variabel dependen penelitian ini adalah *FFR* yang diproksikan oleh *database* sanksi OJK untuk menentukan sampel *FFR firms*, serta kriteria

sampling Beasley (1996) dalam Karissa (2012) untuk menentukan sampel perusahaan non-*FFR* sebagai sampel pembanding.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang ada, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini:

1. Apakah variabel *financial pressure* yang diproksikan oleh *ROA* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
2. Apakah variabel *financial pressure* yang diproksikan oleh *TAT* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
3. Apakah variabel *ineffective monitoring* yang diproksikan oleh *IND* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
4. Apakah variabel *auditor switch* yang diproksikan oleh *CPA* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?
5. Apakah variabel *justification* yang diproksikan oleh *TAC* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, berikut adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *financial pressure* yang diproksikan oleh *ROA* terhadap *fraudulent financial reporting*.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *financial pressure* yang diproksikan oleh *TAT* terhadap *fraudulent financial reporting*.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *ineffective monitoring* yang diproksikan oleh *IND* terhadap *fraudulent financial reporting*.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *auditor switch* yang diproksikan oleh *CPA* terhadap *fraudulent financial reporting*.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *justification* yang diproksikan oleh *TAC* terhadap *fraudulent financial reporting*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diberikan melalui penelitian ini bagi berbagai pihak adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada manajemen mengenai faktor-faktor *FFR* sehingga dapat mendeteksi dan mengantisipasi *FFR* agar tidak berkembang menjadi skandal yang merugikan.
2. Memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan eksternal tentang faktor-faktor *FFR* sebagai salah satu bahan pertimbangan ketika membuat keputusan ekonomi.
3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai *FFR* melalui metode komprehensif dan teruji secara empiris sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia.
4. Bagi pelajar, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut.
5. Bagi peneliti sendiri, melalui penelitian ini diperoleh pengalaman menyusun karya ilmiah yang baik serta melatih manajemen waktu, tenaga, dan materi.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penyajian dari skripsi ini yang telah disesuaikan dengan format yang diberikan Universitas Multimedia Nusantara:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengurai tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian ini dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam bab ini dijelaskan pula kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian. Uraian tersebut meliputi definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, serta metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan analisis deskriptif data, pengujian hipotesis, dan pembahasan analisis.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan, menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian, dan memberikan saran bagi peneliti berikutnya.